



**BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN RI**

# **LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN**

Periode Tahun 2022

**Pusat Informasi & Komunikasi**

Sub Bagian Humas & Tata Usaha Kepala Perwakilan  
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

# **LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2022**

Kegiatan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah menerima dan memberikan layanan terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Pengaduan dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, *email/surat* maupun melalui *website*. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara harus dibenahi.

Tujuan dari laporan ini adalah mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK, terutama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

**RESUME ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT  
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022**

No	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	<b>Saluran</b>	Jumlah : 5
	a) <i>Website</i>	: 1
	b) Surat/ <i>Email</i> /Telepon	: 4
	c) Langsung	: 0
	d) Kotak Pengaduan	: 0
2.	<b>Leading Topik</b>	
	Pengaduan Masyarakat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tidak dibayarnya proyek pekerjaan Jalan Batu Klo ke arah Poros sejauh 2,8 km (APBD Kabupaten Mahakam Ulu);</li> <li>2. Permohonan Pengembalian batas hak milik tanah kepada Pemerintah Kota Balikpapan;</li> <li>3. Informasi adanya keluhan masyarakat dan permohonan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek rehabilitasi jembatan Desa Tanjung Limau;</li> <li>4. Informasi tidak berkembangnya dan kerugian yang dialami oleh perusda;</li> <li>5. Ada ketidakadilan pada Pokja Pemilihan paket pekerjaan Rehap Gedung Kantor Basuki Rahmat.</li> </ol>
3.	<b>Topik yang perlu mendapat perhatian</b>	
	Pengaduan Masyarakat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tidak dibayarnya proyek pekerjaan Jalan Batu Klo ke arah Poros sejauh 2,8 km (APBD Kabupaten Mahakam Ulu);</li> <li>2. Permohonan Pengembalian batas hak milik tanah kepada Pemerintah Kota Balikpapan;</li> <li>3. Informasi adanya keluhan masyarakat dan permohonan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek rehabilitasi jembatan Desa Tanjung Limau;</li> <li>4. Informasi tidak berkembangnya dan kerugian yang dialami oleh perusda;</li> <li>5. Ada ketidakadilan pada Pokja Pemilihan paket pekerjaan Rehap Gedung Kantor Basuki Rahmat.</li> </ol>

## **I. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni *website*, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda. Pada Tahun 2022, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui saluran *website*, surat/*email*/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat**

No	Saluran	Jumlah	Persentase
1	<i>Website</i>	1	20%
2	Surat/ <i>Email</i> /Telepon	4	80%
3	Langsung	0	0%
4	Kotak Pengaduan	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 (lima) pengaduan di Tahun 2022 melalui *website* dan surat yang dikirim ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

## **II. TOPIK PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan, serta pengaduan yang terkait dengan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain.

Selama Tahun 2022 pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Persentase Topik Pengaduan Masyarakat**

No	Topik	Jumlah	Persentase
	<b>Pemeriksaan</b>		
1	Permohonan Pemeriksaan	1	20%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	2	40%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	0%
	<b>Non Pemeriksaan</b>		

4	Kepegawaian/ SDM	-	0%
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	0%
6	Lain-lain	2	20%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Terdapat Pengaduan masyarakat di Tahun 2022, yang diklasifikasikan ke dalam topik pemeriksaan.

### **III. TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat yang masuk, prosedurnya akan diteruskan ke sub bagian hukum untuk ditelaah lebih mendalam.

Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat**

No	Topik	Jml	Yang Ditanggapi Oleh Subbag Hukum	Yang Diteruskan Ke Satker	Trash
	<b>Pemeriksaan</b>				
1	Permohonan Pemeriksaan	1	-	1	-
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	2	-	2	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	-
	<b>Non Pemeriksaan</b>				
4	Kepegawaian/ SDM	-	-	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-	-
6	Lain-lain	2	-	2	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

#### **IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan LKPD.

Demikian Laporan Pengaduan Masyarakat ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small mark.

Agus Priyono  
NIP. 197204211998031